

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
PERIODE JANUARI 2022 - MARET 2022**



TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah**

Disahkan di Pandeglang,
Pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022

Top Manager,

TTD

Titis Tri Wulandari, S.H. S.Psi., M.Hum.

Ketua Tim Survei,

TTD

Indira Patmi, S.H.

Koordinator Tim Survey,

TTD

Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Pandeglang untuk periode Januari sampai dengan Maret 2022 ini telah selesai.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pandeglang mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi ini dapat diartikan bahwa Instansi Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II Bersih dari Praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Indeks Persepsi Anti Korupsi dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini dapat berguna, khususnya bagi Pengadilan Negeri Pandeglang dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Pandeglang, 05 April 2022
Ketua Tim Survei

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
BAB II.....	5
METODOLOGI.....	5
2.1. Metode Penelitian.....	5
2.2. Populasi Dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	6
2.5. Teknik Analisis Data.....	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	13
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	23
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	24
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Rekomendasi	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Guna menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, maka Pengadilan Negeri Pandeglang perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas

Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 520/DJU/PS.02/4/2016 tertanggal 13 April 2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
- i) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi Anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pandeglang.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja tim survei akan diawasi oleh penanggung jawab (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja tim survei saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh tim survei, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi Anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi Anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi Anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3 Nilai
Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

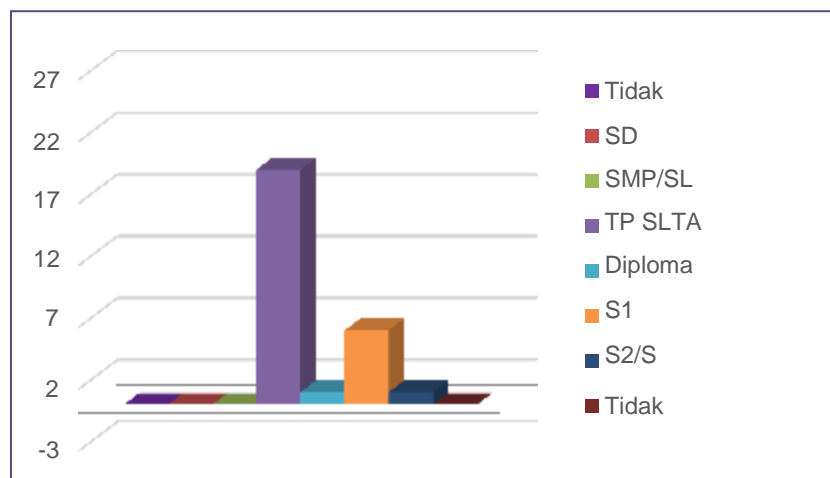
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar SLTA.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SMP/SLTP	0	0%
4	SLTA	19	70%
5	Diploma	1	4%
6	S1	6	22%
7	S2/S3	1	4%
8	Tidak Mencantumkan	0	0%
Jumlah		27	100%

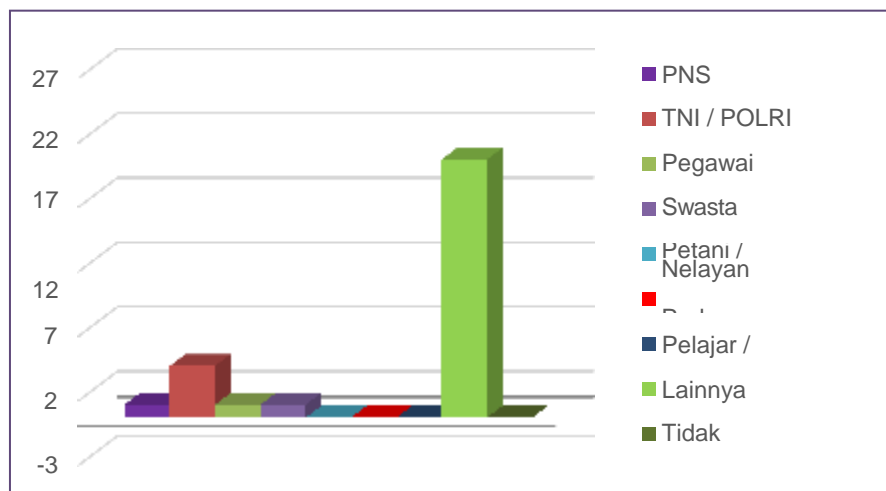


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 74% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang memiliki pekerjaan lainnya, 15% sebagai TNI/POLRI.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS	1	4%
2	TNI / POLRI	4	15%
3	Pegawai Swasta	1	4%
4	Wiraswasta	1	4%
5	Petani / Nelayan	0	0%
6	Pedagang	0	0%
7	Pelajar / Mahasiswa	0	0%
8	Lainnya	20	74%
9	Tidak Mencantumkan	0	0%
Jumlah		27	100%



3.1.3. Domisili responden

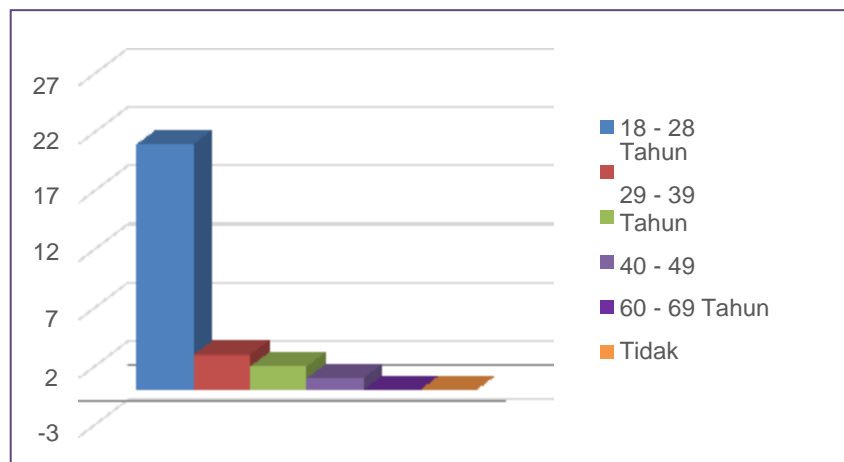
Dari data yang terkumpul selama survei, domisili Responden berada di wilayah Propinsi Banten.

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun berjumlah 21 orang.

Tabel 6.
Usia responden

No	Umur	Jumlah	%
1	18 - 28 Tahun	21	78%
2	29 - 39 Tahun	3	11%
3	40 - 49 Tahun	2	7%
4	50 - 59 Tahun	1	4%
5	60 - 69 Tahun	0	0%
6	Tidak mencantumkan	0	0%
Jumlah		27	100%



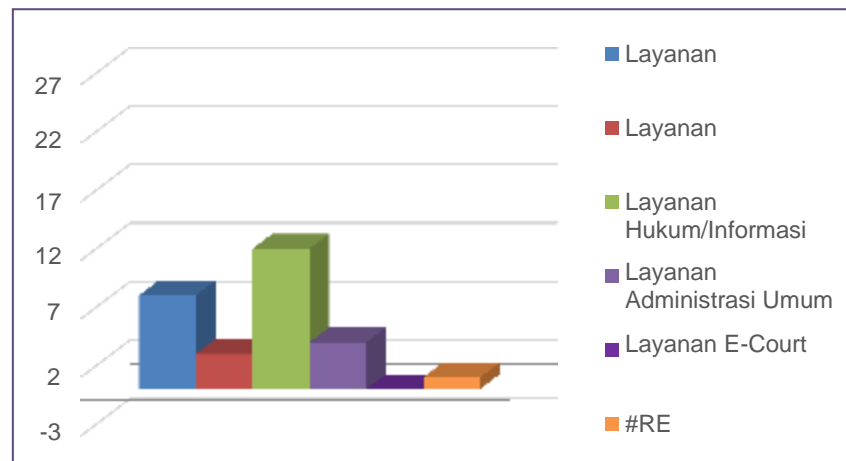
3.1.5. Layanan yang digunakan

Dari data yang terkumpul selama survei, Layanan Hukum / Informasi menempati urutan terbanyak yaitu sejumlah 44% sedangkan Layanan Pidana sejumlah 30%, Layanan Perdata sejumlah 11%, sedangkan layanan Administrasi Umum sejumlah 15% serta Layanan E-Court 0%.

Tabel 7.

Jenis layanan yang digunakan

No	Umur	Jumlah	%
1	Layanan Pidana	8	30%
2	Layanan Perdata	3	11%
3	Layanan Hukum/Informasi	12	44%
4	Layanan Administrasi Umum	4	15%
5	Layanan E-Court	0	0%
Jumlah		27	100%



3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indicator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

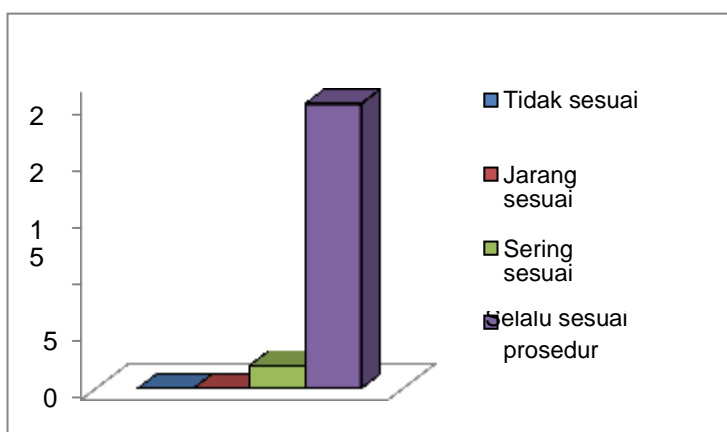
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3,92**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Manipulasi Peraturan**

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Sesuai	1	0	0
2	Kurang Sesuai	2	0	0
3	Sesuai	3	2	7
4	Sangat Sesuai	4	25	93
Jumlah			27	100



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

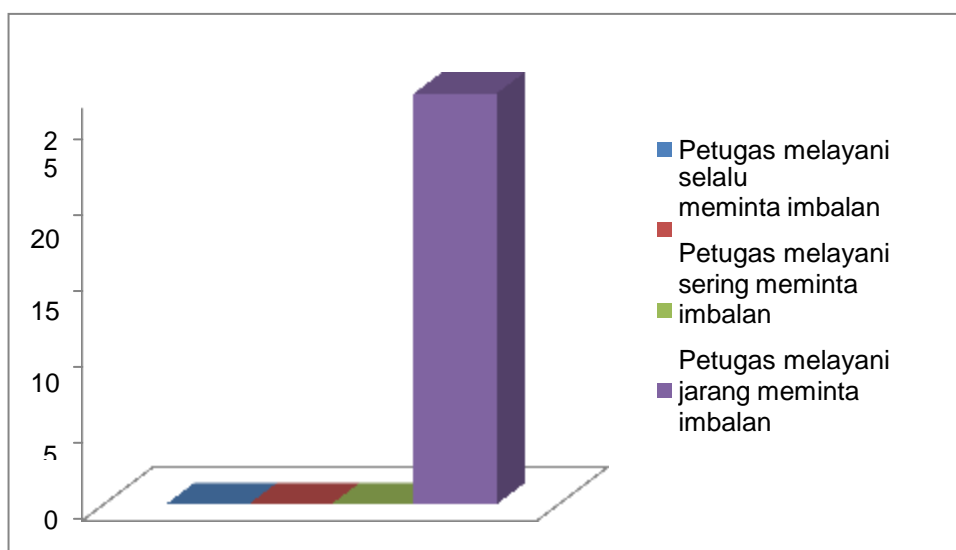
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja

pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 9.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0
2	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0
3	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	0	0
4	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	27	100
Jumlah			27	100



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

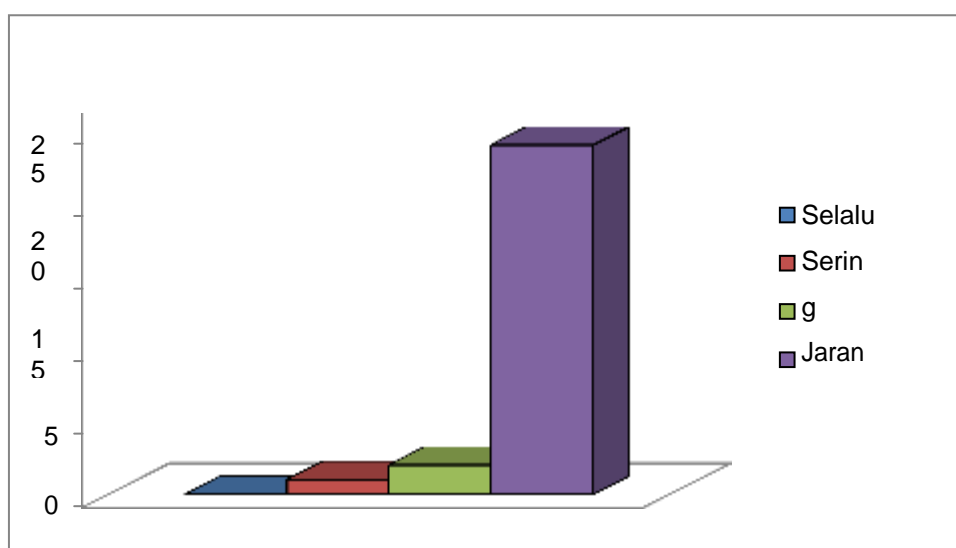
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3, 85**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Menjual Pengaruh**.

Tabel 10.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	1	4
3	Jarang	3	2	7
4	Tidak ada	4	24	89
Jumlah			27	100



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

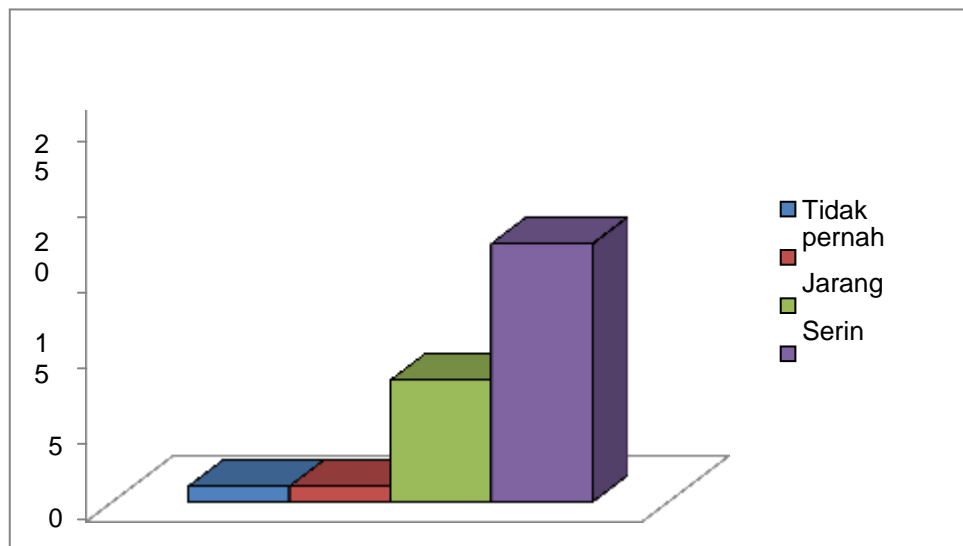
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3, 51**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang baik dari **Transparansi Biaya**.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak pernah	1	1	4
2	Jarang	2	1	4
3	Sering	3	8	30
4	Selalu	4	17	63
Jumlah			27	100



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

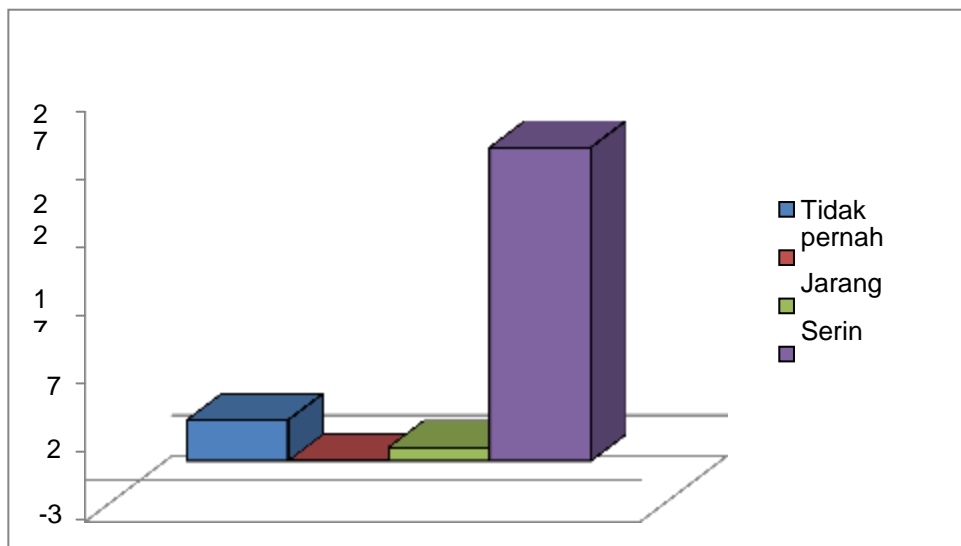
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3, 63**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Biaya Tambahan**.

Tabel 12.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak pernah	1	3	11
2	Jarang	2	0	0
3	Sering	3	1	4
4	Selalu	4	23	85
Jumlah			27	100



3.2.6. Indikator Hadiah

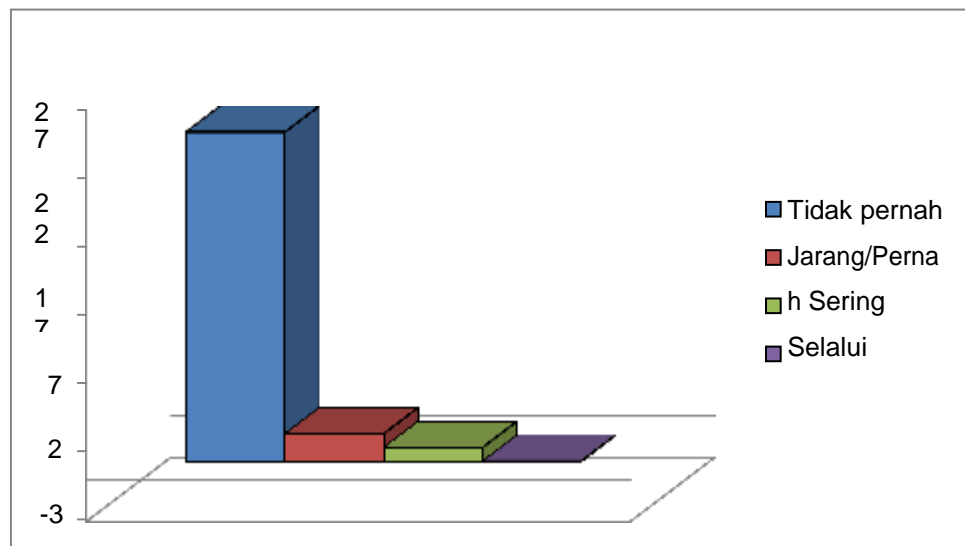
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,85**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Menerima Hadiah**.

Tabel 13.

Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	1	4
3	Jarang	3	2	7
4	Tidak pernah	4	24	89
Jumlah			27	100



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

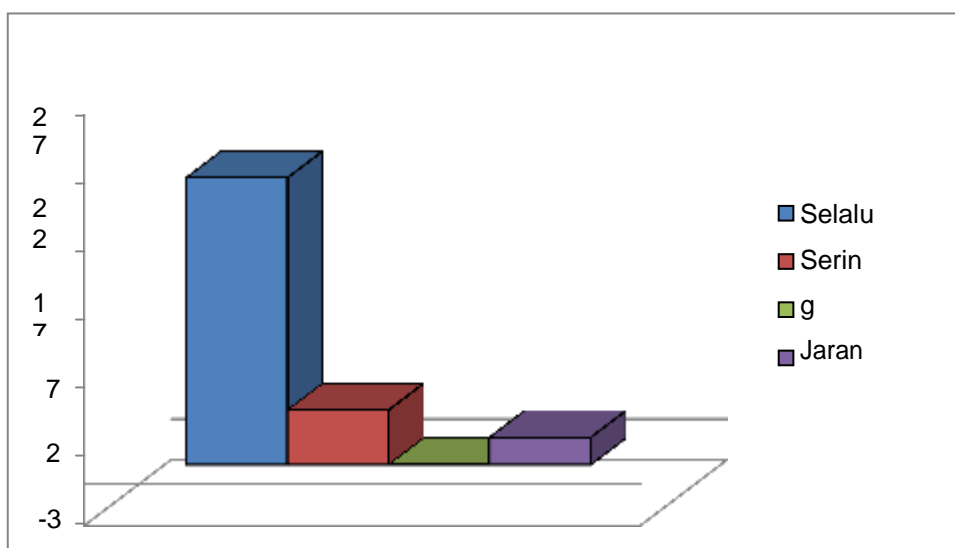
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **3, 63**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Transparansi Pembayaran**.

Tabel 14.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	1	2	7
2	Jarang	2	0	0
3	Sering	3	4	15
4	Selalu	4	21	78
Jumlah			27	100



3.2.8. Indikator Percaloan

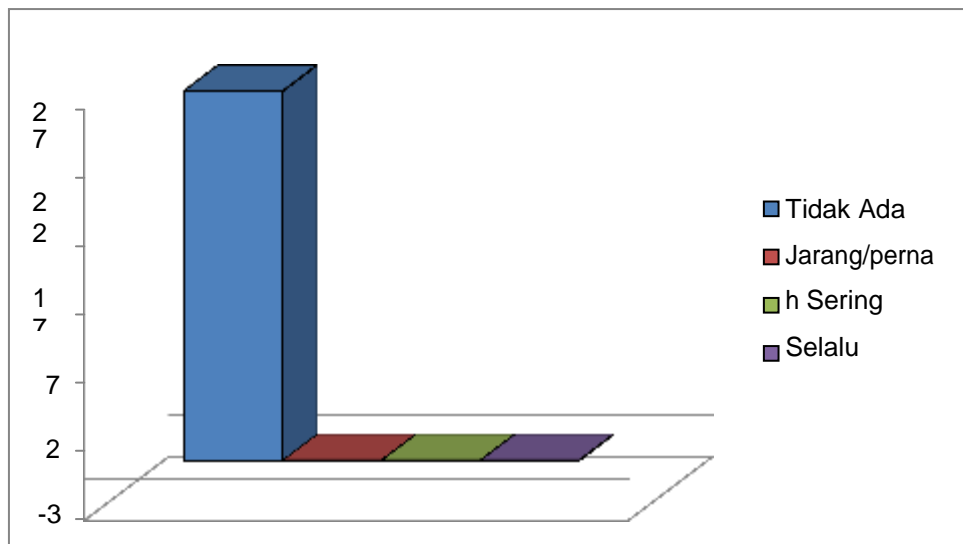
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **4, 00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang **bersih dari tindakan Percaloan**.

Tabel 15.

Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	27	100
Jumlah			27	100



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

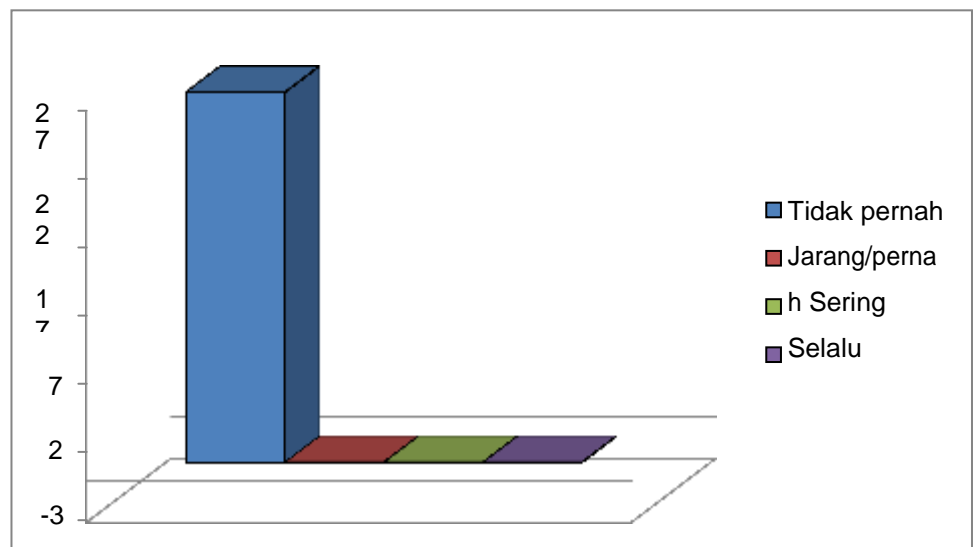
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4, 00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Perbuatan Curang**.

Tabel 16.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	27	100
Jumlah			27	100



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

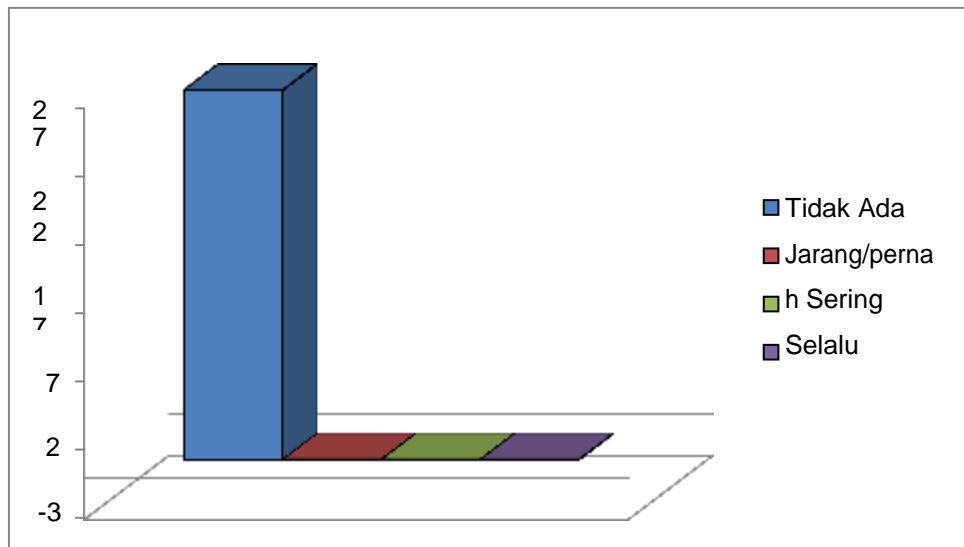
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **4, 00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang bersih dari **Transaksi Rahasia**.

Tabel 17.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	27	100
Jumlah			27	100

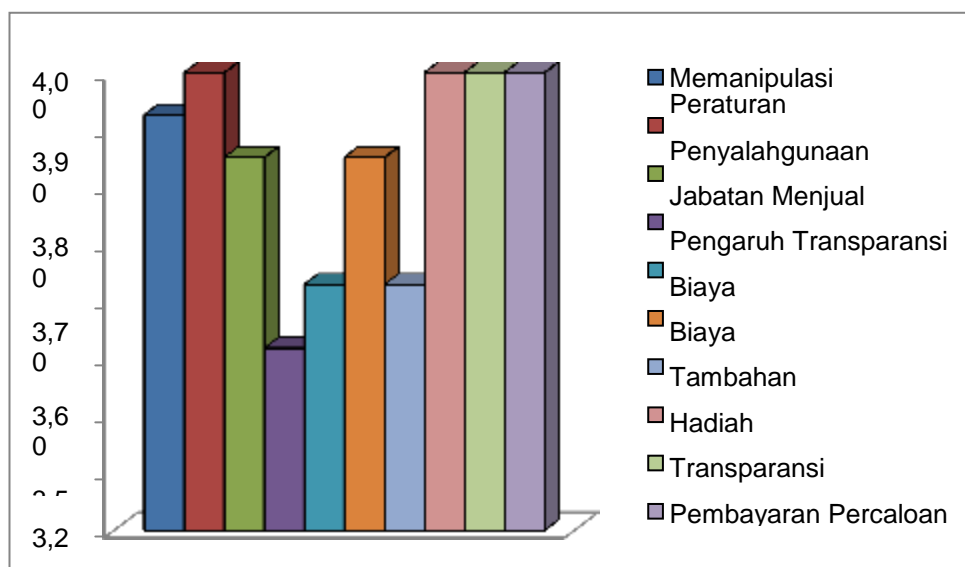


3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang sebesar **3,84**.(Sangat Baik).

Tabel 18.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang



Indeks **3,84** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3,20 - 4,00**

Tabel 19.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Pandeglang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang.

Adapun untuk masukan dan pandangan dari responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pandeglang para responden mayoritas meminta untuk pelayanan yang sudah ada dapat dipertahankan serta bisa lebih ditingkatkan lagi untuk menjadi lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pandeglang diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Pandeglang memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3.84** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,92.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,85.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,51.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,63.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,85.
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,63.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00.

Sehingga dapat dari daftar di atas, dapat diketahui bahwa 3 (tiga) indikator terendah, yaitu:

1. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,51.
2. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,63.
3. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,63.

Walaupun terdapat 3 (tiga) unsur indikator terendah seperti tersebut diatas, namun tetap mendapatkan nilai indeks dalam katagori kinerja Bersih dari korupsi.

4.2. Rekomendasi

Dengan disusunnya laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan I 2022 periode Januari sampai dengan Maret 2022 dengan mendapatkan nilai indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 3,84 / 96.02%, diharapkan para hakim dan para pegawai di Pengadilan Negeri Pandeglang dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik guna mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Indeks Total

Data Umum Responden

Data Domisili Responden

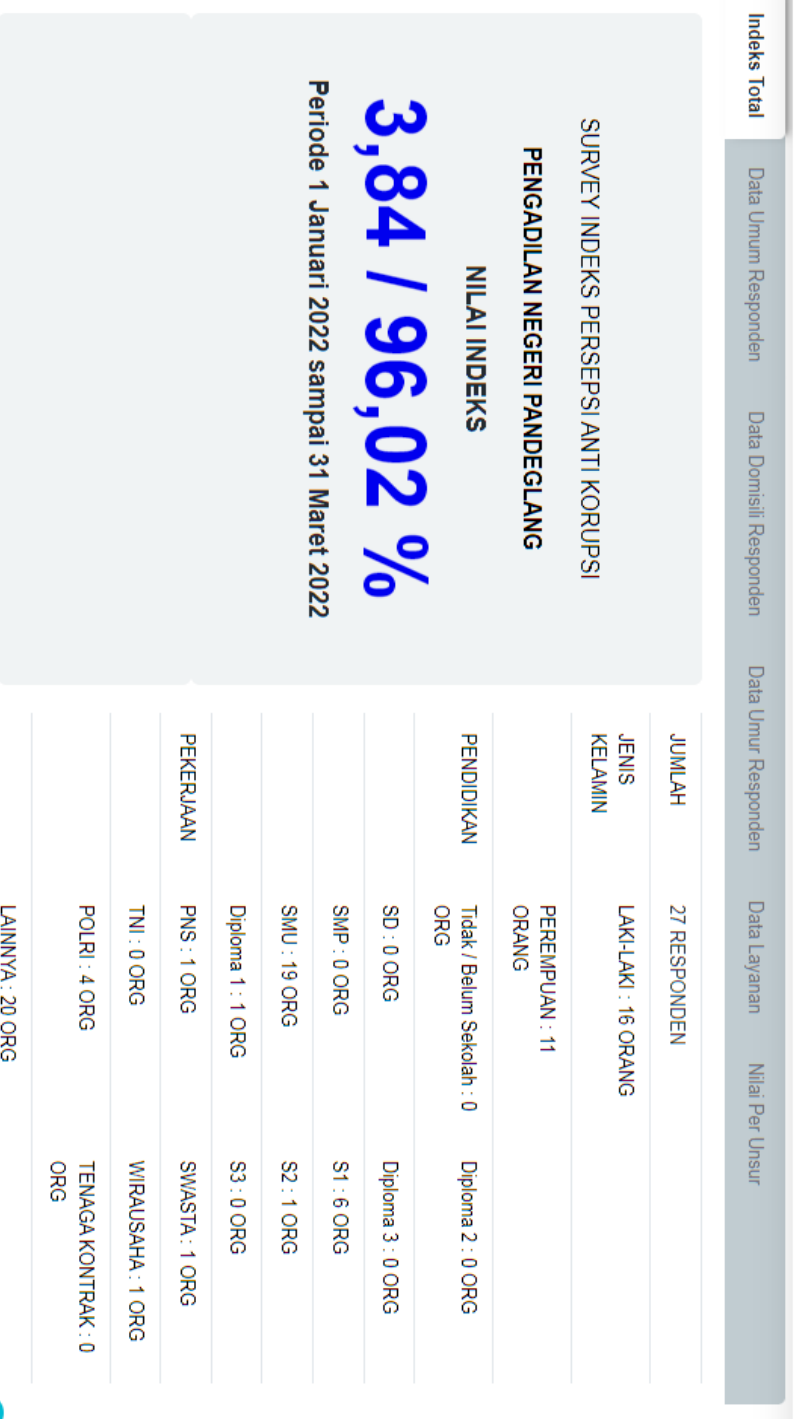
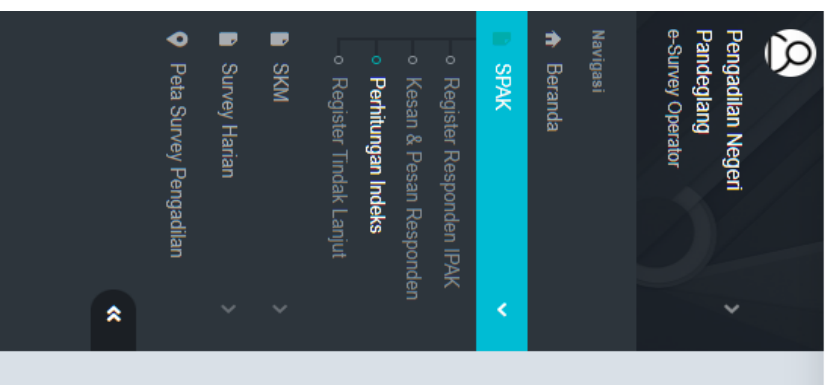
Data Umur Responden

Data Layanan

Nilai Per Unsur

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	106	108	104	95	98	104	98	108	108	108	
NRR Per RL	3,926	4,000	3,852	3,519	3,630	3,852	3,630	4,000	4,000	4,000	38,407
NRR Tertimbang	0,393	0,400	0,385	0,352	0,363	0,385	0,363	0,400	0,400	0,400	3,841
IPAK Unit Pelayanan	3,84										

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

**Pengadilan Negeri
Pandejlang
e-Survey Operator**

SPAK

- o Register Responden IPAK
- o Kasan & Pesan Responden
- o **Perthitungan Indeks**
- o Register Tindak Lanjut

- SKM
- Survey Harian
- Peta Survey Pengadilan

NAVIGASI

- Beranda

Preview Publikasi

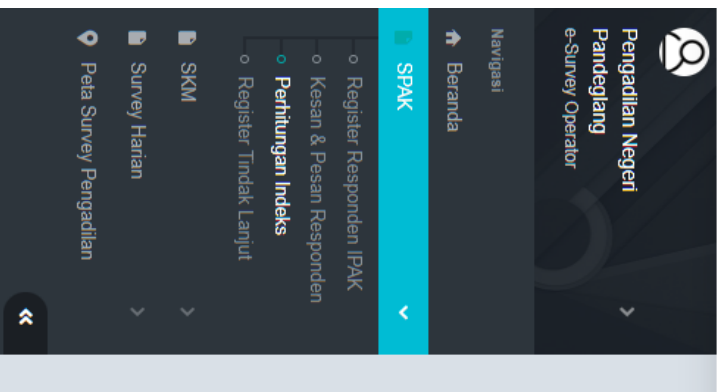
NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Indeks Total Data Umum Responden Data Domisili Responden Data Umur Responden **Data Layanan** Nilai Per Unsur

Layanan	Jumlah (Orang)
1 Layanan Pidana	8
2 Layanan Perdata	3
3 Layanan Hukum / Informasi	12
4 Layanan Administrasi Umum	4

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	21	77,78
29 - 39 Th	3	11,11
40 - 49 Th	2	7,41
50 - 59 Th	1	3,70
60 - 69 Th	0	0,00
Total	27	